

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan dalam bidang teknologi telah merambat ke seluruh dunia sebagai dampak adanya globalisasi. Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yang mengikuti perkembangan teknologi dunia dalam rangka mengejar ketinggalan. Kemajuan dalam bidang teknologi di Indonesia telah memberikan berbagai kemudahan bagi seluruh masyarakat baik dari kalangan atas hingga kalangan bawah, salah satunya teknologi di bidang elektronik.

Teknologi video audio yang beberapa dasawarsa yang lalu hanya dapat dimiliki oleh kalangan tertentu, sekarang sudah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, karena video audio bukan menjadi barang yang mewah lagi. Hal tersebut sebagai akibat dari pesatnya teknologi video audio yang telah berkembang menjadi sebuah industri baru yang bernama VCD (*video compact disk*). Produk yang dihasilkan menjamin akan kualitas yang diberikan dengan biaya yang tidak terlalu besar, dengan sendirinya masyarakat dari berbagai kalangan berusaha untuk mendapatkannya, dengan demikian teknologi ini sudah dapat dinikmati terutama bagi kelas menengah ke bawah, yang masih haus akan hiburan.

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi ini adalah semakin marak dan meluasnya pembajakan terhadap Hak Cipta, terutama dalam bentuk VCD. Penyebabnya adalah adanya kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan

teknologi VCD, sementara harga untuk VCD aslinya masih sangat tinggi. Selain itu juga masih lemahnya implementasi hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta, melihat kenyataan tersebut maka perlu diberlakukannya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, agar tidak terjadi pembajakan terhadap Hak Cipta, terutama dalam bentuk VCD. Aparat penegak hukum sebagai lembaga pelindung masyarakat, lebih meningkatkan kinerjanya yang salah satunya dalam bidang perlindungan Hak Cipta, dengan mempertegas komitmen dan tekad memberantas pembajakan serta perlu adanya pemberatan hukuman semaksimal mungkin bagi para pelaku tindak pidana Hak Cipta.

Pernyataan ini perlu disadari karena semakin banyaknya terjadi tindak pidana di bidang Hak Cipta berupa pembajakan terhadap VCD. Banyaknya VCD-VCD bajakan yang beredar di pasaran secara bebas ternyata juga memiliki mutu cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa teknologi pembajak juga semakin canggih.

Lebih lanjut terhadap perlindungan hukum Hak Cipta ini, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang ciptaan apa saja yang perlu dilindungi dan berapa lama masa berlakunya.

Adapun ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang meliputi:¹

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;

¹ Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta Sinar Grafika, Hal. 13-14.

3. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film, serta karya rekaman radio;
4. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
5. Segala bentuk seni rupa seperti, seni lukis, seni pahat, seni patung dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
6. Seni batik;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Sinematografi;
10. Fotografi;
11. Program komputer;
12. Terjemahan, tafsiran, saduran dan penyusunan bunga rampai;
13. Perfilman, rekaman, gubahan musik;
14. Sketsa atau manuskrip yang sudah merupakan satu kesatuan yang lengkap.

Masa berlaku atau perlindungan terhadap Hak Cipta yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Bila Hak Cipta atas ciptaannya tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

Surakarta merupakan salah satu kota dimana peredaran barang-barang bajakan sangat berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pasar-pasar gelap (*black marker*) yang mana pasar ini menjual barang asli tapi palsu, oleh karena itu HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dianggap seolah-olah tidak ada, hal tersebut lebih disebabkan bagaimana konsumen yang membutuhkan barang murah, sehingga dapat memperoleh apa yang diinginkan.

Bentuk pembajakan Hak Cipta yang paling umum yang sering kita dengar dan ramai dibicarakan adalah penggandaan dengan cara “*back to back*” dengan kata lain penggandaan dengan mencontoh ciptaan aslinya. Di satu pihak pembajak dengan beraninya terus melakukan pembajakan, sedangkan di lain pihak konsumen dengan giatnya mencari VCD-VCD hasil bajakan tersebut. Salah satu kasus adanya pernyataan dari pihak rental yang menyatakan bahwa harga VCD resmi terlalu mahal, bila dibeli kemudian untuk disewakan malah cenderung rugi. Pihak pembeli dan penyewa selalu mencari VCD yang harganya murah walaupun mereka tahu jelas bahwa resiko VCD bajakan gambarnya kurang jelas dan dapat merusak *player* mereka sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta adalah merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor yang menyebabkan tindak pidana Hak Cipta pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan tindak pidana tersebut telah demikian besar terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.

Di bidang sosial budaya, dampak yang timbul adalah semakin meluasnya pembajakan. Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.

Dalam perjanjian TRIPs, ketentuan dan prosedur berperkara dalam hal HAKI tidak mengakibatkan bahwa harus diadakan ketentuan-ketentuan yang khusus berkenaan dengan pelaksanaan dari peraturan yang berlaku umum.

Menurut Edi Damain terhadap kasus-kasus pembajakan VCD khususnya perlu dikonsolidasikan beberapa langkah-langkah kebijakan yang perlu segera dilaksanakan:²

1. Sosialisasi pengertian pentingnya penghormatan atas HAKI pada umumnya dan VCD pada khususnya, melalui pendidikan masyarakat yang luas terutama generasi mudanya pada tahap sedini mungkin.
2. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk peran serta menyediakan perangkat perundang-undangan.

² Muhammad Djumhana dan Djubaidah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung PT. Cipta Aditya Bakti, hal. 18.

3. Meningkatkan kualitas para penegak hukumnya melalui pendidikan terpadu terutama pada Pengacara, Polisi dan Hakim.

Apabila melihat keadaan Indonesia berkenaan dengan perkara-perkara yang menyangkut HAKI, Indonesia belum memiliki peradilan maupun instansi-instansi yang secara khusus ditunjuk oleh peraturan-peraturan untuk menangani perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah Hak Cipta apa lagi di Surakarta. Jadi perkara-perkara yang menyangkut tentang pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta ini sampai sekarang masih merupakan perkara yang diselesaikan melalui peradilan umum saja yaitu Peradilan Niaga.

Bertambahnya teknologi tinggi dalam memasuki era pasar bebas yang membuka lebar masuknya segala sesuatu ke negara ini yang sekiranya masih dianggap perlu hendaknya dapat membuat masyarakat semakin dapat menerapkan terhadap efektivitas perlindungan Hak Cipta sebagai kajian yang akan ditulis dalam masalah ini. Muncul anggapan, bahwa perlindungan Hak Cipta kurang berarti dalam melindungi ciptaan atau produk-produk baru.

Mengingat masih banyaknya persoalan-persoalan yang menyangkut pelanggaran Hak Cipta di masyarakat yang pelanggaran-pelanggaran tersebut belum mendapatkan penerapan hukum seperti, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain, kurang efektifnya pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran HAKI di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengambil pokok bahasan dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan VCD (*Video Compact Disk*) Ilegal.

B. PEMBATASAN MASALAH

Ruang lingkup pembatasan masalah dimaksud untuk memberikan arah agar tidak keluar dari ruang lingkup penelitian serta mengingat terbatasnya kemampuan waktu dan dana, maka berdasarkan uraian latar belakang mengenai tindak pidana pelanggaran terhadap Hak Cipta, maka akan ditarik pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penetapan subjek tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana atau tindakan?
2. Penetapan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penetapan subjek tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana atau tindakan?
2. Bagaimana penetapan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap VCD ilegal.
- b. Mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif penulis dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terutama terhadap pembajakan VCD ilegal menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana yang berkaitan dengan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), khususnya Hak Cipta yang diharapkan dapat menambah literatur serta bahan-bahan informasi ilmiah.
- c. Memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat yang dapat diambil, bagi masyarakat sangatlah penting dimana dengan adanya kepastian hukum, terhadap kebijakan dan perlindungan hukum dalam bidang Hak Cipta, maka akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas daya cipta masyarakat.

- b. Bagi lembaga Hak Cipta, dengan adanya evaluasi ini dapat lebih meningkatkan perlindungan hukum serta penanggulangan keamanan terhadap semua ciptaan.
- c. Bagi lembaga universitas, sebagai sumbangan buku bacaan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- d. Bagi penulis, ini sangatlah penting karena merupakan salah satu persyaratan dalam rangka meraih gelar sarjana hukum.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Pidana dalam arti hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.³

Pembajakan VCD yang menjamur di seluruh wilayah Indonesia termasuk kota Surakarta, telah membuat perdagangan VCD asli tidak dapat berkembang dengan baik, hal itu sangat merugikan para pengusaha. Pengusaha akan merasa dirugikan apabila barang dagangannya yang telah

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan penyediaan Bahan Kuliah fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hal. 2.

dibangun, dipromosikan, dan dikembangkan dengan biaya yang banyak dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan komersil. Pembajak tidak hanya merugikan pengusaha yang memiliki hak atas barang tetapi juga merugikan konsumen. Konsumen merasa tertipu dengan barang yang sama dengan kualitas yang berbeda dengan barang aslinya.

Pemikiran yang sama juga terjadi pada pemegang Hak Cipta, mereka juga mengalami kerugian jika hasil ciptaannya baik yang berupa karya cipta atau desain telah ditiru dan diperbanyak untuk tujuan komersil secara tanpa hak dan atau tanpa adanya *royalty* yang dibayarkan pada pemegang hak. Sebagai suatu ekspresi dari kemampuan budi dan nalar si pencipta, akan berkembang positif apabila si pencipta memperoleh perlindungan hukum yang baik dari penegak hukum.

Adanya perlindungan hukum juga dapat mendorong pencipta bersikap lebih produktif menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Keproduktifan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan dirinya saja tetapi juga bagi kemakmuran negara.

Ditetapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, memberi nafas segar bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta, karena Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang cukup tegas dibandingkan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Meskipun demikian, Undang-Undang Hak Cipta terbaru tidak akan berlaku efektif jika tidak didukung oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana peranan POLRI (khususnya Poltabes Surakarta) sebagai salah satu penegak hukum dalam mengimplementasikan penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Tindak pidana terhadap HAKI dapat dikelompokkan ke dalam salah satu jenis kejahatan ekonomi yaitu berupa *property crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan seseorang atau negara. Tindak pidana tersebut paling tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi.
2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individu saja.
3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.
4. Perbuatan bisa dilakukan seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah, atau dalam usahanya di bidang industri dan perdagangan.

G. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan penulis di atas, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder dengan tidak mengesampingkan data primer.

2. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto, menggolongkan jenis penelitian menjadi beberapa golongan, yaitu:⁴

Apabila digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum yang ada, penulis menggunakan penelitian deskriptif (*Descriptive research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu melihat, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan dan menganalisis suatu kolektivitas yang diteliti.

3. Sumber data

Sebagaimana suatu penelitian hukum sosiologis atau penelitian non doktrinal dengan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan untuk menunjang dalam pembuatan skripsi ini adalah data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian empirik di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan.

a. Sumber data primer

Data ini di peroleh dari observasi langsung dari lapangan maupun wawancara dengan penjual VCD bajakan serta dari Aparat Penegak Hukum Surakarta yaitu pihak Poltabes.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum berupa:

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 9-10.

- 1) Bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan yang meliputi UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, KUH perdata, KUHP.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dengan demikian bahan sekunder meliputi: Buku-buku literatur, berita-berita kasus tentang pembajakan VCD yang dimuat dimajalah dan koran atau temuan langsung di lapangan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung demi memperoleh data yang valid. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara (*interview*).

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Poltabes Surakarta.

c. Penelitian Kepustakaan

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan jalan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku yang diperlukan, serta literatur, peraturan perundang-undangan,

dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data sosiologis, dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, dengan demikian dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.⁵

Pemilihan rancangan analisis untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada tiga komponen utama.⁶ Ketiga komponen pokok tersebut meliputi reduksi data (*Data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Data reduksi merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari tinjauan umum mengenai kebijakan hukum pidana, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan hukum pidana, pengertian VCD, tinjauan umum mengenai HAKI, devinisi HAKI, devinisi hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta,

⁵ Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 104.

⁶ Moles Matthew B dan Michael Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan, Tjetjep Rohendi, Jakarta: UI Press, Hal. 16.

pelanggaran hak cipta, penyidikan, sanksi pidana, penyelesaian sengketa hak cipta terhadap VCD ilegal.

Bab III Pembahasan masalah dan hasil penelitian, tinjauan umum terhadap tindak pidana, penetapan perlindungan hukum terhadap hak cipta, penetapan perbuatan sebagai tindak pidana hak cipta, bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta, penetapan subjek tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, tinjauan umum mengenai penegakan hukum terhadap hak cipta, definisi penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum terhadap hak cipta VCD ilegal, tugas kepolisian, wewenang kepolisian sebagai penyidik.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad, 1997, *Mak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, Eresco.
- Lexy, Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 13-14.
- Matthew, Moles dan Huberman, Michael, 1992, *Qualitative Data Analisis*, Terjamahan Rohendi, Tjetjep, Jakarta, UI Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hal. 2.
- Mutaruk, Muhammad, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta, airlangga.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Cet III, Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 9-10.
- Sudjana Eggi, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung
-, 1984, *Undang-undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Umbara.
-, 2002, *Undang-undang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Umbara.
- Surbekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wignyosoebroto, Sutandyo, 2002, *Silabus Metode Penelitian*, Progran Pasca Sarjana, Airlangga.